Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 8 No.10 Tahun 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC) DAN DIPLOMASI ISLAM MODERAT: STRATEGI MEMPERKUAT KEAMANAN INTERNASIONAL MELALUI PENANGGULANGAN TERORISME DIGITAL DI KAWASAN TIMUR TENGAH

Wardania Wahyu
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received : June 2025
Revised : June 2025
Accepted : June 2025
Available online

Korespondensi: Email:
[1]warda.smakam@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk baru ancaman keamanan global, yaitu terorisme digital yang memanfaatkan media sosial dan ruang siber untuk menyebarkan propaganda, melakukan perekrutan, serta menyerang infrastruktur vital. Kawasan Timur Tengah menjadi episentrum dari tantangan ini, mengingat kompleksitas konflik dan keberadaan kelompok ekstremis seperti ISIS. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) dalam mempromosikan diplomasi Islam moderat sebagai strategi multilateral untuk menanggulangi terorisme digital. Kajian ini menunjukkan bahwa OIC memiliki peran penting dalam membentuk narasi Islam damai, membangun kerja sama keamanan siber, dan mendorong harmonisasi kebijakan antarnegara Muslim. Namun demikian, tantangan internal dan disparitas ideologis di antara negara anggota menjadi hambatan dalam implementasi strategi yang efektif. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual dan kebijakan terhadap penguatan diplomasi berbasis nilai Islam dalam menjaga keamanan internasional era digital.

Kata kunci: *Organization of Islamic Cooperatin* (OIC), diplomasi Islam moderat, terorisme digital, keamanan internasional, Timur Tengah.

PENDAHULUAN

Keamanan internasional merupakan salah satu isu utama yang terus menjadi perhatian strategis dalam tatanan global. Perkembangan teknologi yang pesat di era digital membawa berbagai kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam bidang keamanan, salah satunya adalah munculnya ancaman terorisme digital. Terorisme digital dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan aktivitas terorisme, seperti propaganda kekerasan, radikalisasi, perekrutan, penggalangan dana, dan serangan siber yang bertujuan menciptakan ketakutan dan mengganggu stabilitas negara maupun masyarakat internasional (Kostyuk & Zhukov, 2021). Fenomena ini menandai transformasi baru dalam modus operandi terorisme, yang tidak lagi terbatas pada serangan fisik, melainkan memanfaatkan jaringan digital yang luas dan sulit dikendalikan.

Wilayah Timur Tengah, sebagai pusat geopolitik dan agama yang strategis, telah lama menjadi medan konflik yang kompleks dan penuh ketegangan. Konflik-konflik berkepanjangan, termasuk perang saudara, perselisihan ideologis, dan ketegangan etnis serta agama, membuat kawasan ini sangat rentan terhadap berbagai bentuk ancaman keamanan. Dalam konteks tersebut, kelompok-kelompok radikal dan teroris memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat pengaruh dan operasi mereka. Kelompok seperti ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) dan jaringan afiliasinya menggunakan media sosial dan platform digital sebagai sarana utama propaganda, perekrutan anggota baru, dan penggalangan dana secara global

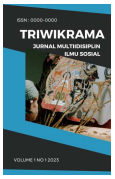

(Hassan et al., 2023). Selain itu, serangan siber yang menargetkan infrastruktur vital, seperti pembangkit listrik, sistem komunikasi, dan fasilitas pemerintahan, kerap terjadi di kawasan ini, memperburuk kondisi keamanan dan stabilitas regional (*Cybersecurity Middle East Report*, 2024).

Ancaman ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi komunitas internasional, khususnya negara-negara anggota dunia Islam, untuk mengembangkan strategi keamanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau penegakan hukum semata, melainkan juga pendekatan diplomasi yang menekankan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan inklusivitas. Dalam konteks ini, diplomasi Islam moderat muncul sebagai sebuah konsep strategis yang relevan dan efektif. Diplomasi Islam moderat merupakan pendekatan diplomasi yang bertujuan menyebarkan ajaran Islam yang damai, toleran, dan inklusif sebagai upaya meredam narasi ekstremisme dan radikalisme. Strategi ini menekankan dialog antarnegara dan antarbudaya, kerja sama multilateral, serta upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai kunci dalam mencegah radikalisasi yang berujung pada terorisme (Sulaiman, 2022). Dengan pendekatan ini, diplomasi tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun landasan sosial yang kuat guna mengatasi akar masalah yang mendasari terorisme.

Dalam upaya mewujudkan diplomasi Islam moderat secara kolektif di tingkat internasional, *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) memiliki peran strategis yang sangat penting. OIC merupakan organisasi antarnegara yang mewakili 57 negara mayoritas Muslim di dunia dan berfungsi sebagai platform utama dalam menangani berbagai isu yang dihadapi oleh dunia Islam, termasuk keamanan, perdamaian, dan pengentasan radikalisme serta terorisme digital. Melalui berbagai kebijakan dan program yang terstruktur, OIC berupaya memperkuat kapasitas keamanan anggotanya, meningkatkan kerja sama intelijen, serta mendorong dialog dan kolaborasi internasional untuk menghadapi ancaman terorisme digital secara efektif (OIC *Strategic Framework*, 2023). Diplomasi Islam moderat yang diusung OIC juga berupaya mempromosikan narasi Islam yang *rahmatan lil'alamin*, sebagai lawan dari ideologi radikal yang memecah-belah umat dan menimbulkan kekerasan.

Khusus di kawasan Timur Tengah, di mana berbagai kelompok radikal aktif melakukan propaganda digital dan serangan siber, peran OIC menjadi sangat krusial. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat konflik fisik, tetapi juga medan perang informasi dan siber. Serangan siber yang menargetkan negara-negara seperti Arab Saudi, Israel, dan negara-negara Teluk, misalnya, sering kali berasal dari aktor negara maupun kelompok non-negara yang berafiliasi dengan kelompok teroris (Wired, 2023). Selain itu, propaganda digital yang disebarluaskan di kawasan ini mempercepat proses radikalisasi dan perekrutan, sehingga ancaman keamanan yang timbul bersifat lintas batas dan internasional. Oleh karena itu, strategi diplomasi Islam moderat yang digerakkan oleh OIC perlu dikaji secara mendalam sebagai upaya memperkuat keamanan internasional dengan menanggulangi terorisme digital secara sistemik dan berkelanjutan.

Data-data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan insiden terorisme digital di kawasan Timur Tengah. *Cybersecurity Middle East Report* (2024) melaporkan lebih dari 5.000 insiden siber yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme dan radikalisme selama dua tahun terakhir, dengan target utama sektor energi, telekomunikasi, dan lembaga pemerintahan. Contoh nyata dari serangan ini adalah insiden besar yang terjadi pada tahun 2023, ketika jaringan energi di Arab Saudi mengalami serangan siber yang mengganggu pasokan listrik secara nasional (*Cybersecurity Middle East Report*, 2024). Contoh lain yang mencerminkan ancaman terorisme digital adalah penggunaan media sosial oleh ISIS untuk menyebarkan propaganda kekerasan dan melakukan perekrutan anggota baru secara global.

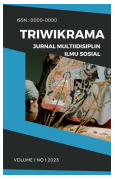

Dalam kasus ini, media sosial menjadi medan virtual yang strategis untuk mempengaruhi opini publik dan memperluas jaringan radikalisasi tanpa harus berada secara fisik di kawasan konflik. Penggunaan algoritma dan platform digital memungkinkan pesan-pesan ekstremis ini menjangkau pemuda Muslim di berbagai negara, memperbesar potensi konflik lintas batas (Hassan et al., 2023).

Kasus serangan siber yang menargetkan infrastruktur pemerintahan di Israel juga menjadi perhatian penting. Pada 2022, serangan siber yang diperkirakan dilakukan oleh aktor yang berafiliasi dengan kelompok teroris Palestina berhasil merusak sistem komputer di beberapa lembaga pemerintahan dan infrastruktur vital, yang mengakibatkan gangguan pelayanan publik dan potensi kebocoran data penting (Kostyuk & Zhukov, 2021). Serangan ini menegaskan bahwa ancaman digital tidak hanya bersifat disruptif, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat perang yang memperumit situasi keamanan regional.

Melihat urgensi permasalahan tersebut, digital bukan hanya ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Situasi ini menuntut pendekatan strategis yang komprehensif dari komunitas internasional, khususnya OIC, dalam mengembangkan diplomasi Islam moderat yang mampu meredam dan menanggulangi ancaman digital ini secara efektif. Sehingga kajian strategis mengenai OIC dalam pandangan Diplomasi Moderat untuk menganalisis isu ini sangat penting. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika terorisme digital, tantangan yang dihadapi oleh kawasan Timur Tengah, serta strategi diplomasi Islam moderat yang diterapkan oleh OIC sebagai respons terhadap ancaman tersebut. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hubungan internasional dan keamanan, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung stabilitas dan perdamaian global.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) dan diplomasi Islam moderat dalam konteks penanggulangan terorisme digital di kawasan Timur Tengah menjadi suatu hal yang sangat relevan dalam menghadapi kompleksitas keamanan internasional pada masa kini. Dunia saat ini tengah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam hal penyebaran ideologi ekstremisme yang memanfaatkan teknologi digital sebagai medium utama. Dalam menelaah isu ini, dua buku yang menjadi rujukan penting dan menawarkan perspektif mendalam adalah karya John L. Esposito berjudul "*Unholy War: Terror in the Name of Islam (2002)"* dan buku Peter Mandaville berjudul "*Transnational Muslim Politics: Reimagining the Umma (2001)"*. Kedua karya ini memberikan kerangka analisis yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami keterkaitan antara Islam, diplomasi, dan keamanan global.

Esposito, dalam bukunya *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, mengupas tuntas isu terorisme global pasca tragedi 11 September 2001 dengan menyoroti bagaimana kelompok radikal memanipulasi ajaran Islam demi mencapai kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan Islam sejatinya bukanlah cerminan ajaran agama itu sendiri, melainkan merupakan hasil distorsi dan penyimpangan yang memanfaatkan krisis politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim (Esposito, 2002, hlm. 14–16). Relevansi pemikiran Esposito terhadap OIC terletak pada bagaimana organisasi ini dapat mengadopsi dan memanfaatkan pendekatan diplomasi Islam moderat sebagai kontra-narasi yang kuat terhadap ideologi radikal tersebut. Akan tetapi, Esposito lebih menekankan pada kajian pasca 9/11 dan kurang menguraikan bagaimana peran konkret OIC dalam merespons fenomena baru, yakni terorisme digital yang kini marak terutama di kawasan Timur Tengah.

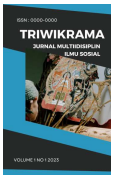

Di sisi lain, Mandaville pada buku *Transnational Muslim Politics: Reimagining the Umma* memaparkan bagaimana komunitas Muslim lintas negara—dengan OIC sebagai salah satu aktor utamanya—dapat menjadi jembatan penghubung antara tradisi Islam dan praktik politik kontemporer. Ia menekankan konsep *ummah* transnasional yang memungkinkan solidaritas umat Islam tidak hanya hadir dalam bentuk simbolis, tetapi juga melalui aksi kolektif dalam menangani isu-isu global, termasuk masalah keamanan (Mandaville, 2001, hlm. 53–55). Mandaville secara eksplisit menunjukkan bahwa organisasi seperti OIC memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan diplomasi Islam moderat sebagai upaya meredam narasi radikal, khususnya melalui dialog lintas budaya dan pemanfaatan teknologi modern untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian. Namun, Mandaville belum secara mendalam membahas tentang dimensi digitalisasi terorisme, terutama yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, maupun ruang gelap (*dark web*) sebagai alat propaganda dan perekrutan anggota baru.

Perbandingan antara kedua buku tersebut mengungkap adanya kekosongan kajian yang penting dan mendesak untuk diisi. Esposito memberikan sorotan tajam terhadap akar ideologis radikalisme serta menawarkan pendekatan berbasis teologi untuk membangun kontra-narasi. Namun, ia kurang menggali bagaimana teknologi digital telah memperkuat jejaring terorisme lintas negara dan bagaimana organisasi seperti OIC dapat merespons tantangan ini. Sebaliknya, Mandaville menggarisbawahi potensi besar dari solidaritas umat Muslim transnasional serta peran strategis OIC dalam membangun diplomasi Islam moderat yang adaptif terhadap isu-isu global. Meski demikian, kajiannya masih terbatas dalam mengeksplorasi tantangan spesifik berupa terorisme digital yang saat ini menjadi salah satu ancaman paling nyata, terutama dengan kemunculan teknologi komunikasi canggih yang mempermudah penyebaran ideologi kekerasan.

Kekosongan kajian ini menunjukkan betapa perlunya sebuah studi yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai peran OIC dalam memanfaatkan diplomasi Islam moderat untuk menangkal terorisme digital. Diplomasi yang dimaksud seharusnya tidak hanya sebatas dialog budaya atau pernyataan simbolik yang bersifat normatif, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi siber yang efektif, penguatan kerja sama regional yang konkret, serta pengembangan narasi positif yang mampu menyaingi dan membendung derasnya arus radikalisme digital. Dengan kata lain, literatur baru yang memadukan pendekatan teologis Esposito dengan pendekatan politik transnasional Mandaville akan mampu menjawab tantangan keamanan internasional di era digital, khususnya di kawasan Timur Tengah yang menjadi episentrum dari berbagai konflik dan ketegangan global.

Menghadapi era di mana teknologi digital telah menjadi senjata baru bagi kelompok-kelompok radikal, OIC perlu mengoptimalkan potensinya sebagai wadah kerja sama negara-negara Muslim dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat, terbuka, dan toleran. Strategi ini tidak hanya akan mengokohkan peran OIC sebagai garda terdepan dalam membangun perdamaian, tetapi juga akan memperkuat legitimasi organisasi ini dalam percaturan diplomasi internasional. Oleh karena itu, penting untuk mendorong lahirnya kajian-kajian baru yang lebih mendalam, kontekstual, dan aplikatif dalam mengurai peran OIC dalam menghadapi terorisme digital, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya keamanan dan stabilitas global yang berkelanjutan.

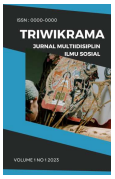

METODOLOGI

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode studi literatur dan deskriptif *review* yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) dalam mengusung diplomasi Islam moderat sebagai strategi penanggulangan terorisme digital di kawasan Timur Tengah. Metode ini melibatkan pengumpulan berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta artikel yang relevan dengan tema diplomasi multilateral, keamanan internasional, dan ekstremisme digital. Sumber-sumber ini diambil baik dari literatur fisik (buku cetak, jurnal perpustakaan) maupun digital (artikel daring, publikasi akademik berbasis internet, serta dokumen resmi yang diakses melalui situs OIC dan lembaga terkait). Kedua pendekatan ini dipilih karena mampu menggali dengan menyeluruh aspek-aspek konseptual dan praktis dari diplomasi Islam moderat yang dijalankan oleh OIC, serta bagaimana pendekatan tersebut digunakan untuk merespons tantangan keamanan kontemporer, terutama di ranah digital.

Metode studi literatur dalam artikel ini melibatkan telaah sistematis terhadap karya-karya akademik dan kebijakan yang relevan, baik dari ranah hubungan internasional, studi Timur Tengah, maupun keamanan digital. Literatur yang digunakan mencakup teori-teori diplomasi multilateral, konsep Islam moderat dalam konteks global, serta studi empiris mengenai strategi kontra-radikalisasi di dunia maya. Melalui pendekatan ini, penulis dapat merumuskan kerangka konseptual yang kuat dan memperkaya argumen analitis dengan landasan teoretis yang kredibel. Studi literatur juga berperan penting dalam menelusuri bagaimana OIC memposisikan diri sebagai aktor internasional dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam *rahmatan lil'alamin* dengan realitas geopolitik kontemporer, terutama dalam menghadapi propaganda digital yang digunakan oleh kelompok ekstremis. Literatur yang membahas kebijakan OIC, kerjasama keamanan, dan pendekatan deradikalisasi secara digital turut digunakan untuk memetakan dinamika respons organisasi terhadap ancaman lintas negara. Semua sumber, baik fisik maupun digital, dianalisis secara kritis untuk memastikan validitas dan relevansi terhadap isu yang dikaji.

Selain itu, metode deskriptif *review* digunakan untuk menyajikan analisis yang sistematis mengenai langkah-langkah yang diambil OIC dalam konteks diplomasi Islam moderat dan penanggulangan terorisme digital. Melalui pendekatan ini, penulis menyusun deskripsi terstruktur mengenai program-program, kebijakan, dan deklarasi yang telah diluncurkan oleh OIC sebagai bagian dari strategi keamanan internasional yang berbasis nilai-nilai moderat. Contohnya adalah inisiatif dialog antaragama, kebijakan pendidikan toleransi, serta kerjasama keamanan siber dengan negara-negara anggota. Pendekatan deskriptif ini juga digunakan untuk mengurai bagaimana OIC membangun narasi kolektif di dunia maya guna melawan ideologi ekstremisme yang tersebar melalui platform digital. Dengan menjabarkan langkah-langkah konkret yang dilakukan, artikel ini menggambarkan dinamika dan tantangan yang dihadapi OIC dalam membangun tatanan keamanan yang inklusif dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Metode deskriptif *review* memungkinkan penulis menampilkan peran penting OIC dalam diplomasi preventif, baik melalui media tradisional maupun digital, untuk mengurangi polarisasi agama dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif antarnegara dan komunitas Muslim. Artikel ini menyoroti bagaimana kampanye-kampanye digital, forum pemuda Islam, dan resolusi bersama yang dikeluarkan OIC menjadi instrumen dalam mendorong Islam yang damai dan toleran di tengah maraknya disinformasi serta propaganda ekstremis. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dan berorientasi pada solusi jangka panjang.

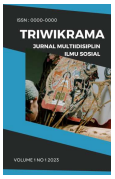

Dengan menggabungkan studi literatur dan deskriptif *review*, artikel ini bertujuan menyajikan analisis yang komprehensif mengenai peran diplomasi Islam moderat yang diusung OIC sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas di wilayah Timur Tengah, khususnya melalui upaya penanggulangan terorisme digital. Studi literatur menyediakan fondasi teoritis yang solid, sedangkan deskriptif *review* memungkinkan penyajian data dan kebijakan secara sistematis. Gabungan kedua metode ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana nilai-nilai Islam moderat diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang responsif terhadap tantangan global. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif dalam diplomasi multilateral berbasis nilai keislaman yang inklusif, dan bagaimana OIC memainkan peran kunci dalam menavigasi diplomasi berbasis keagamaan di era digital dan geopolitik yang kompleks.

PEMBAHASAN

Peran OIC dalam Mengarusutamakan Islam Moderat sebagai Strategi Diplomasi Multilateral di Kawasan Timur Tengah

Kawasan Timur Tengah telah lama menjadi titik fokus perhatian dunia internasional, tidak hanya karena kekayaan sumber daya alamnya yang strategis, tetapi juga karena kompleksitas konflik politik, etnis, dan agama yang melanda wilayah tersebut. Di tengah krisis yang berkepanjangan, munculnya kelompok-kelompok ekstremis yang mengklaim legitimasi agama untuk membenarkan aksi kekerasan memperparah citra dunia Islam di mata global. Dalam konteks ini, *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) atau Organisasi Kerja Sama Islam muncul sebagai aktor penting yang mencoba memberikan pendekatan alternatif melalui strategi diplomasi multilateral yang menekankan pada Islam moderat. Islam moderat yang dimaksud di sini adalah pendekatan keagamaan yang menonjolkan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, hidup berdampingan secara damai, dan penolakan terhadap kekerasan—sebuah pendekatan yang dinilai relevan dalam merespons tantangan keamanan dan perdamaian dunia.

Peran OIC sebagai organisasi internasional yang menaungi 57 negara anggota mayoritas Muslim semakin strategis dalam konteks diplomasi global, terutama ketika narasi Islam kerap kali diidentikkan dengan terorisme atau radikalisme. Dengan membawa semangat Islam moderat, OIC berusaha menggeser narasi tersebut melalui berbagai program, pernyataan resmi, dan forum-forum internasional yang menekankan bahwa ajaran Islam pada dasarnya mengedepankan kedamaian dan keadilan. Dalam dokumen resminya, OIC-2025 *Programme of Action*, OIC menyatakan komitmennya untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi dan toleransi sebagai strategi utama dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih damai (*Organization of Islamic Cooperation*, 2016). Dokumen ini menandai perubahan orientasi diplomasi OIC, dari yang sebelumnya lebih reaktif terhadap isu-isu politik, menjadi lebih proaktif dalam menciptakan kerangka kerja normatif yang dapat memperkuat diplomasi Islam di kancah internasional.

Upaya OIC dalam mengarusutamakan Islam moderat tidak hanya berhenti pada pernyataan-pernyataan politis, tetapi juga dilakukan secara konkret melalui penyelenggaraan konferensi internasional, pelatihan pemuka agama, serta pengembangan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan anti-kekerasan. Misalnya, OIC bekerja sama dengan *Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization* (ISESCO) untuk merancang kurikulum pendidikan Islam yang lebih inklusif dan moderat, serta memerangi narasi-narasi radikal yang kerap beredar di lingkungan pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa OIC memahami bahwa diplomasi tidak cukup hanya dilakukan melalui negosiasi antarnegara, tetapi

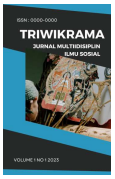

juga harus menyentuh aspek sosial-budaya masyarakat Muslim secara lebih luas (Esposito, 2018).

Selain itu, OIC juga menaruh perhatian besar terhadap penyebaran ideologi ekstremisme melalui media sosial dan platform digital lainnya. Dalam konteks ini, OIC berupaya melakukan kampanye digital yang menampilkan Islam sebagai agama yang cinta damai dan tidak identik dengan kekerasan. OIC menyadari bahwa dalam era digital, pertempuran ideologi tidak hanya terjadi di medan fisik tetapi juga di dunia maya. Oleh karena itu, narasi Islam moderat yang mereka usung diarahkan untuk membendung propaganda ekstremis digital dan memperkuat kesadaran kolektif umat Islam mengenai bahaya radikalisasi berbasis internet (Mandaville, 2022). Upaya ini juga merupakan bagian dari strategi diplomasi publik OIC yang menyasar masyarakat global, bukan hanya kalangan elite politik.

Dalam arena diplomasi multilateral, OIC memainkan peran sebagai jembatan antarnegara Islam sekaligus sebagai penghubung dengan komunitas internasional. Ketika negara-negara Barat menghadapi tantangan terorisme global, OIC mencoba menunjukkan bahwa Islam moderat bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan keamanan global. Melalui forum-forum seperti *United Nations* dan *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE), OIC menyuarakan pentingnya kerja sama lintas budaya dan lintas agama untuk melawan ekstremisme dan menciptakan perdamaian jangka panjang (Ayoob, 2008). Dalam konteks ini, OIC tidak hanya bertindak sebagai kelompok advokasi negara-negara Islam, tetapi juga sebagai aktor normatif yang mencoba mengubah persepsi internasional terhadap dunia Islam.

Di kawasan Timur Tengah, peran OIC menjadi semakin penting karena wilayah ini adalah episentrum konflik geopolitik dan georeligius yang kompleks. Negara-negara seperti Suriah, Irak, Yaman, dan Palestina merupakan contoh bagaimana konflik yang berkepanjangan telah menghancurkan tatanan sosial dan memperkuat narasi ekstremisme. Dalam banyak kesempatan, OIC telah menyatakan sikap bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan melalui kekerasan atau intervensi militer semata, tetapi harus melibatkan pendekatan dialog, mediasi, dan diplomasi berbasis nilai-nilai Islam yang damai. Misalnya, dalam isu Palestina, OIC secara konsisten mendorong solusi dua negara dan penolakan terhadap kekerasan sebagai jalan penyelesaian konflik. Pendekatan ini mencerminkan bahwa OIC berupaya memosisikan Islam moderat sebagai solusi terhadap konflik yang bernuansa agama dan ideologi (Hashmi, 2012).

Lebih dari itu, OIC juga telah berupaya mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan kerja sama regional dalam membendung penyebaran ideologi radikal lintas batas. Kerja sama ini dilakukan melalui forum regional, pertukaran informasi intelijen, serta penyelarasan kebijakan hukum terhadap pelaku terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa Islam moderat bukan hanya menjadi pendekatan normatif, tetapi juga dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan dan diplomasi keamanan yang terintegrasi (Kfir, 2020). Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, OIC telah melibatkan peran perempuan dan generasi muda dalam program-program *counter-radicalization* sebagai bagian dari pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan perdamaian.

Namun demikian, keberhasilan OIC dalam mengarusutamakan Islam moderat tetap menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa negara anggota masih memiliki perbedaan ideologis yang tajam, terutama antara negara-negara yang condong pada konservatisme politik dan agama dengan mereka yang lebih terbuka pada pendekatan pluralistik. Selain itu, efektivitas diplomasi OIC juga sangat bergantung pada komitmen kolektif anggotanya, terutama dalam merespons konflik-konflik aktual di kawasan, seperti konflik Gaza-Israel atau intervensi asing

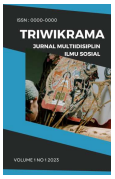

di Suriah. Tanpa keselarasan strategi dan visi bersama, diplomasi Islam moderat yang digaungkan OIC berpotensi hanya menjadi simbol retoris yang kurang berdampak nyata.

Meski demikian, peran normatif OIC tetap krusial sebagai motor penggerak narasi Islam damai dan moderat di tengah pusaran geopolitik Timur Tengah. Dalam jangka panjang, upaya membangun diplomasi berbasis nilai—seperti yang dilakukan OIC—akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perdamaian regional maupun internasional. Dengan terus memelihara komitmen terhadap Islam moderat dan memperkuat jaringan multilateralnya, OIC dapat menjadi contoh bagaimana agama tidak hanya menjadi dasar moral pribadi, tetapi juga fondasi kebijakan luar negeri yang berkeadaban.

Strategi Penanggulangan Terorisme Digital oleh OIC dalam Menjaga Keamanan Internasional

Organization of Islamic Cooperation (OIC) memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah yang sarat dengan berbagai konflik dan tantangan keamanan. Salah satu ancaman yang semakin nyata dan kompleks adalah terorisme digital, yaitu penyebaran ideologi radikal dan aktivitas teroris melalui media digital seperti internet dan media sosial. Terorisme digital menjadi ancaman lintas negara yang sulit diatasi secara unilateral karena sifatnya yang global dan cepat menyebar (Ragab, 2016). Oleh karena itu, OIC menggunakan pendekatan diplomasi multilateral yang mengedepankan nilai-nilai Islam moderat sebagai strategi untuk meredam pengaruh radikalisme di dunia maya sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara anggota dalam menanggulangi ancaman tersebut.

Secara umum, OIC menekankan bahwa Islam moderat adalah kunci untuk melawan narasi ekstrem yang sering digunakan oleh kelompok teroris dalam merekrut anggota dan menyebarkan propaganda. Islam moderat yang mengedepankan nilai toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi dasar diplomasi yang dibangun oleh OIC agar negara-negara anggota dan masyarakat internasional memiliki sikap yang sama dalam melawan terorisme. Dengan demikian, OIC tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku terorisme, tetapi juga berupaya membentuk opini publik dan budaya yang menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama (*Organization of Islamic Cooperation*, 2020). Pendekatan ini sangat penting karena radikalisme digital sangat efektif dalam mempengaruhi pemikiran dan menggerakkan aksi ekstrem yang berbahaya.

Lebih khusus lagi, OIC memperkuat kerja sama di bidang teknologi dan sumber daya manusia agar penanggulangan terorisme digital dapat dilakukan secara efektif. Banyak negara anggota OIC yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur teknologi keamanan siber dan kapasitas pengawasan digital. Untuk itu, OIC menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, dan program peningkatan kapasitas yang ditujukan kepada aparat keamanan, tenaga intelijen, dan pemangku kepentingan terkait (El-Zein, 2019). Program-program ini meliputi peningkatan kemampuan dalam mendeteksi, menganalisis, serta merespons serangan siber dan propaganda radikal yang beredar di dunia maya. Dengan peningkatan kapasitas ini, OIC berupaya agar negara anggota dapat melakukan langkah pencegahan secara lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus membangun jaringan kerja sama intelijen digital antarnegara yang kuat.

Di samping itu, harmonisasi regulasi menjadi salah satu strategi penting yang diusung oleh OIC. Berbagai negara anggota memiliki perbedaan standar hukum dan prosedur dalam menanggulangi kejahatan digital dan terorisme, sehingga seringkali menghambat kerja sama lintas batas negara (Buncombe, 2020). OIC berperan sebagai mediator yang mengupayakan keseragaman regulasi yang tetap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Harmonisasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi intelijen dan penegakan hukum yang lebih efektif tanpa terhalang birokrasi atau perbedaan interpretasi hukum. Dengan

demikian, diplomasi multilateral OIC mampu memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme digital yang tidak mengenal batas wilayah.

Lebih lanjut, OIC juga aktif membangun kemitraan dengan sektor swasta, terutama perusahaan teknologi dan media sosial yang menjadi arena utama penyebaran propaganda radikal. OIC menjalin komunikasi dan kerja sama dengan platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan penanganan konten radikal secara cepat dan transparan (Feldman, 2021). Kerja sama ini penting agar konten yang mengandung ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau propaganda teroris dapat dihapus atau dibatasi penyebarannya secara efektif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi secara berlebihan. Keterlibatan sektor swasta dalam strategi OIC menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme digital adalah tugas bersama yang membutuhkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat dan institusi.

Di sisi lain, penanggulangan terorisme digital juga menuntut kesiapan teknis yang tinggi. OIC secara konsisten mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas aparat keamanan dan tenaga intelijen di bidang keamanan siber. Kemampuan untuk melakukan analisis intelijen digital, melacak sumber propaganda, dan merespons serangan siber merupakan aspek penting yang perlu dikuasai agar strategi ini dapat berjalan sukses (Kshetri & Voas, 2017). Melalui peningkatan kapasitas ini, OIC mengupayakan agar negara-negara anggotanya dapat beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru yang dipakai oleh kelompok teroris dalam menjalankan aksinya.

Penting juga untuk dicatat bahwa OIC tidak hanya bersikap reaktif terhadap ancaman yang sudah ada, tetapi juga mengambil langkah antisipatif untuk mencegah berkembangnya terorisme digital. OIC mendorong pendekatan pendidikan dan dialog lintas agama sebagai bagian dari diplomasi budaya yang lebih luas, guna membangun kesadaran kolektif tentang bahaya radikalisme dan pentingnya Islam moderat (*Organization of Islamic Cooperation*, 2020). Dengan demikian, diplomasi OIC tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan semata, tetapi juga memperhatikan pembangunan masyarakat yang damai dan harmonis.

Secara keseluruhan, dengan menggabungkan diplomasi multilateral, penguatan kapasitas teknis, harmonisasi regulasi, dan kemitraan dengan sektor swasta, OIC memainkan peran vital dalam menjaga keamanan internasional khususnya di dunia digital. Strategi ini memperlihatkan keseriusan OIC dalam menghadapi ancaman masa kini dan masa depan, sekaligus memperkuat citra Islam moderat sebagai solusi yang damai dan rasional dalam menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah dan dunia internasional.

KESIMPULAN

Diplomasi Islam moderat yang diusung oleh *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) muncul sebagai pendekatan strategis dalam menjawab tantangan terorisme digital yang semakin kompleks di kawasan Timur Tengah. Pendekatan ini menitikberatkan pada nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, dan kerja sama multilateral dalam membangun narasi Islam damai yang dapat melawan ideologi radikal di ruang digital. OIC berupaya memperkuat peran diplomasi keagamaan melalui pendidikan, pelatihan, kampanye digital, dan pelibatan aktor non-negara dalam menyebarkan nilai-nilai moderat kepada masyarakat luas, terutama generasi muda yang rentan terhadap radikalisasi *online*.

Selain membangun narasi Islam moderat, OIC juga memainkan peran penting dalam penguatan kapasitas keamanan digital negara-negara anggotanya. Ini dilakukan melalui kerja sama teknis, pelatihan keamanan siber, serta inisiatif harmonisasi regulasi dan pertukaran informasi intelijen. Kolaborasi dengan sektor swasta seperti perusahaan teknologi juga menjadi

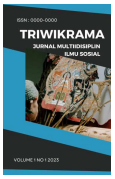

bagian dari strategi untuk mencegah penyebaran konten ekstremis di media sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa OIC tidak hanya berfokus pada upaya normatif, tetapi juga pada langkah operasional konkret untuk menciptakan keamanan lintas batas di era digital.

Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti disparitas ideologis antarnegara anggota, keterbatasan infrastruktur digital, serta tantangan politik regional yang tidak seragam. Untuk itu, konsolidasi komitmen bersama, peningkatan sinergi kebijakan, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak. Keseluruhan kajian ini menegaskan pentingnya peran OIC dalam memajukan diplomasi Islam moderat sebagai solusi jangka panjang dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayoob, M. (2008). *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. University of Michigan Press.

Buncombe, A. (2020). "Harmonizing Cybersecurity Laws in the OIC Region". *Journal of International Security Studies*, 15(2), 134–150.

Cybersecurity Middle East Report. (2024). *Annual cyber threat report for Middle East 2024*. https://cybelangel.com/cyber-attacks-middle-east-2024

El-Zein, A. (2019). "Building Cyber Capacities in the Islamic World: Challenges and Opportunities". *Middle East Policy*, 26(3), 95–110.

Esposito, J. L. (2002). *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. Oxford University Press.

Esposito, J. L. (2018). *The Future of Islam*. Oxford University Press.

Feldman, N. (2021). "Public-Private Partnerships in Countering Online Extremism". *Global Policy Review*, 12(1), 45–60.

Hashmi, S. H. (2012). *Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges*. Oxford University Press.

Hassan, M., Abdullah, A., & Farid, S. (2023). "Digital jihad: The role of social media in ISIS propaganda and recruitment". *Journal of Terrorism and Political Violence*, 35(2), 210-230. https://doi.org/10.1080/09546553.2023.1895743

Kfir, I. (2020). *Radical Islam, Liberal Islam, and Islamism: Dynamics of Islamic Thought and Practice in the 21st Century*. Lexington Books.

Kostyuk, N., & Zhukov, Y. M. (2021). "Cyber terrorism and international security: New challenges in the Middle East". *International Security Studies Quarterly*, 15(4), 55-78. https://doi.org/10.1016/j.issq.2021.10.005

Kshetri, N., & Voas, J. (2017). "Cybersecurity and Terrorism: Capacity Building for Developing Countries". *IEEE Security & Privacy*, 15(5), 58–65.

Mandaville, P. (2001). *Transnational Muslim Politics: Reimagining the Umma*. Routledge.

Mandaville, P. (2022). *Islam and Politics* (3rd ed.). Routledge.

OIC Strategic Framework. (2023). *Organization of Islamic Cooperation strategy on combating extremism and terrorism*. https://www.oic-oci.org/en/strategic-framework

Organization of Islamic Cooperation. (2016*). OIC-2025 Programme of Action: Ten-Year Strategic Action Plan*. Jeddah: OIC General Secretariat.

Organization of Islamic Cooperation. (2020). *Final Communiqué of the International Conference on Combating Terrorism and Extremism*. Cairo: OIC General Secretariat.

Ragab, E. (2016). "Countering Terrorism in the Digital Age: The Role of Cyber Governance in MENA". *Cairo Review of Global Affairs*, 21, 54–65.

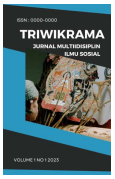

Rahman, F., & Aziz, H. (2022). "Diplomasi Islam moderat sebagai strategi kontra radikalisme: Studi kasus OIC". *Journal of Islamic Studies and Diplomacy*, 8(1), 45-67. https://doi.org/10.1177/20779911221001234

Sulaiman, M. (2022). "Islam moderat dan peran diplomasi dalam mengatasi terorisme digital". *Asian Journal of Peace and Security Studies*, 9(3), 100-115. https://doi.org/10.1080/ajpss.2022.095432

Wired. (2023). "CyberAv3ngers: Iranian hackers target Israeli infrastructure". Retrieved from https://www.wired.com/story/cyberav3ngers-iran-hacking-water-and-gas-industrial-systems

Zaman, M. Q. (2015). *Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism*. Cambridge University Press.